



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN TUTUR  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN  
TUTUR KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Tukur yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Tukur adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tukur untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Tukur yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Tukur adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Tukur serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**Pasal 2**

Renja Kecamatan Tukur Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**Pasal 3**

Renja Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Kecamatan Tukur, hasil evaluasi Renja Kecamatan Tukur tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Tukur tahun berjalan.

#### Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Tukur Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Kecamatan Tukur Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Renja Kecamatan Tukur Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Tukur.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 64

# **RANCANGAN**

**RENCANA KERJA ( RENJA )  
SKPD KECAMATAN TUTUR  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN TUTUR  
Jalan Raya Nongkojajar Nomor 226 Telp. 0343 499089  
TUTUR 67165**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya kami masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD Kecamatan Tukur tahun 2022.

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Tukur tahun 2022 disusun dimaksudkan untuk mengetahui kondisi umum Wilayah, Potensi serta berbagai permasalahan kedepan yang perlu untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati Pasuruan.

Disamping itu Rencana Kerja SKPD Kecamatan Tukur tahun 2022 ini adalah sebagai acuan untuk melangkah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan sosial kemasyarakatan sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak menyimpang dari perencanaan dan setidaknya merupakan tolak ukur untuk bahan evaluasi keberhasilan pembangunan yang dicapai.

Demikian kiranya semoga Rencana Kerja SKPD Kecamatan Tukur Tahun 2022 dapat membawa manfaat serta sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas kedepan ditahun 2023 mendatang.

Pasuruan..... 2021  
CAMAT TUKUR

ttd.

NUR SOBHI, SIP.MM

Pembina

NIP. 196408 3 198603 1 022

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 64 TAHUN 2021  
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2021

**RENCANA KERJA  
KECAMATAN TUTUR  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

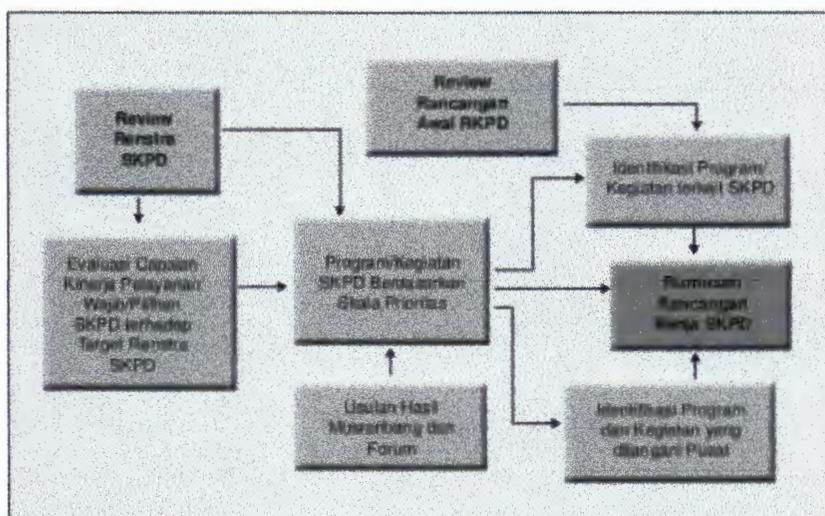
Rencana Kerja Tahun 2022 OPD Kecamatan Tuter yang selanjutnya disebut RENJA adalah dokumen perencanaan pembangunan OPD Kecamatan Tuter, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing satuan kerja dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.



- 4) Pendekatan Top – Down (Atas-Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.
  - 5) Pendekatan Botom-Up (Bawah-Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.
- Skematis proses penyusunan Rancangan Kerja SKPD dapat di gambarkan sebagai berikut :



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana kerja (RENJA) tahun 2022 OPD Kecamatan Tukur adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
  12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2016, tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJOPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
  14. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2016 – 2018;
  16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor ... Tahun .... tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 – 2018;
  17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor ... Tahun .... tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
  18. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021;
  19. Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kecamatan Tukur Tahun 2019 – 2023;
  20. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RENJA OPD Kecamatan Tukur tahun 2022, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran visi, misi satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan. Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Government.

Tujuan Penyusunan RENJA OPD Kecamatan Tukur tahun 2022 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran-sasaran strategis, program-program pembangunan selama tahun 2022 yang sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

##### **Bab V Penutup**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Kecamatan Tukur telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2020 bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2018-2023 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020, dan realisasi renstra OPD kecamatan Tukur yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020, pelaksanaan kinerja Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan OPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp 000,-)	REALISASI ANGGARAN (Rp 000,-)	% ANGGARAN
1	2	3	4	5	6 (= 5/4 X 100 %)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan	604,177,609	523,558,430	86.66%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) Kecamatan	99,550,000	75,395,000	75.74%
		<b>Total</b>	<b>703,727,609</b>	<b>598,953,430</b>	<b>85.11%</b>

*Sesuai PAK Perubahan Tahun 2020*

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
  - Ada beberapa kegiatan yang bersifat mendasar yang di anggarkan setelah adanya perubahan APBD sehingga memperangaruhi rencana kegiatan yang sudah di rencanakan sebelumnya
  - Adanya pandemic covid - 19 maka refocusing anggaran sehingga pelaksanaan realisasi program kegiatan banyak yang tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan

2. Impikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
  - Target capaian program Renstra Tahun 2018-2023 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan RENJA.
  
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
  - Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor penyebab keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.
  - Untuk anggaran yang sudah di refocusing melalui program kegiatan masih bisa di ajukan untuk tahun berikutnya dan bisa di laksanakan dan di realisasikan

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>2020</b>										
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Administrasi Kantor</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik / Air/ Telephone /	48 Rekening		48 Rekening	48 Rekening	100%			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Pengelola Aset, Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	7 Org / bulan		7 Org / bulan	7 Org / bulan	100%			
	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah Pembayaran Honor Jasa Kebersihan Kantor	1 orang / bln		1 orang / bln	1 orang / bln	100%			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	45 Jenis		45 Jenis	45 Jenis	100%			
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2Jenis		2Jenis	2Jenis	100%			
	Penyediaan peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	22 buah		22 buah	22 buah	100%			
	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	1 tahun / 50 org / bln		1 tahun / 50 org / bln	1 tahun / 50 org / bln	100%			
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%			

	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Pembayaran Tenaga Honor Kontrak dan THL	15 org / bln		15 org / bln	15 org / bln	100%			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 jenis		2 jenis	2 jenis	100%			
	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	24 stel		24 stel	24 stel	100%			
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%			
	Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	4 Jenis		4 Jenis	4 Jenis	100%			
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	8 unit		8 unit	8 unit	100%			
	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	4 unti		4 unti	4 unti	100%			
	Pemeliharaan rutin berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas	1 unit		1 unit	1 unit	100%			
	Pengadaan Mebelair	Jumlah Pengadaan Mebel air	2 unit		2 unit	2 unit	100%			
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 unit		2 unit	2 unit	100%			
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	1 unit		1 unit	1 unit	100%			
	Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedan berat rumah gedung kantor	1 paket		1 paket	1 paket	100%			
	<b>Urusan Unsur Kewilayah</b>									
	<b>Bidang Urusan Kecamatan</b>									
	<b>Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan</b>	<b>Jumlah Lembaga Masyarakat yang di bina</b>	<b>4 Lembaga</b>		<b>4 Lembaga</b>	<b>4 Lembaga</b>	100%			
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana/ 2 Keg	2 keg		2 keg	2 keg	100%			
	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana/ 5 Keg	5 keg		5 keg	5 keg	100%			
	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan yang terfasilitasi / 1 keg	1 keg		1 keg	1 keg	100%			

	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Desa / Kelurahan</b>	<b>Nilai SKM Kecamatan, Nilai SAKIP Kecamatan</b>	<b>85,65</b>		<b>85,65</b>	<b>85,65</b>	100%			
	Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan	Jumlah Desa yang melaporkan Administrasi dengan baik / 12 Desa	12 Desa		12 Desa	12 Desa	100%			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan, Semesteran, Tahunan dan Laporan SAKIP / 4 Lap	4 Lap		4 Lap	4 Lap	100%			
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Intensifikasi Penerimaan PBB / 4 Keg	4 Keg		4 Keg	4 Keg	100%			
	<b>Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tuter</b>	<b>Rasio Jumlah Kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan</b>	<b>80%</b>		<b>80%</b>	<b>80%</b>	100%			
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Ketenraman dan Ketertiban Kecamatan / 4 Keg	4 Keg		4 Keg	4 Keg	100%			
<b>2021</b>										
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun					1 Tahun		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Kegiatan Honor / Lapangan	1 Tahun					1 Tahun		

	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Pengelola Aset, Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun					1 Tahun		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap					4 Lap		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Pegawai Kompeten dan Disiplin</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari - heri tertentu	40 Stel					40 Stel		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		
	Penyediaan peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	3 Paket					3 Paket		
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis					2 Jenis		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	2 Keg					2 Keg		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3 Jenis					3 Jenis		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Input : Jumlah Pembayaran Listrik/wifi / Air/ Telephone	1 Tahun					1 Tahun		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan yang di pelihara atau di bayarkan pajaknya	8 Unit					8 Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Pemeliharaan	3 Jenis					3 Jenis		
	<b>Urusan Kewilayahan</b>									
	<b>Bidang Kecamatan</b>									
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Penyelenggaraan</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		



## **2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, maka susunan organisasi Kecamatan Tukur dimaksud terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan yang terdiri:
  - a. Kasubag Umum & Kepegawaian
  - b. Kasubag Penyusunan Program & Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan & Pelayanan
  - b. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanaka oleh Pemerintah Kecamatan Tukur berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Tukur, yaitu permasalahan pada kebijakan, program, kegiatan dan teknis operasional.

- 1) Pada tingkat kebijakan Pemerintah kecamatan Tukur dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan sebagai berikut:
  - a. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Tukur.

- b. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada pembuatan Dokumen Renja.
- 2) Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Tuter dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:
- a. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para pejabat pemerintahan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
  - b. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat OPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk OPD tersebut selama kurun waktu 5 tahun.
  - c. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran OPD yang bersangkutan.
- 3) Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Tuter sebagai berikut:
- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali kurang optimal dalam pelaksanaannya.
  - b. Pola pembinaan pejabat yang belum berorientasi pada peningkatan kerja.
  - c. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Dalam mencapai kinerja pelayanan OPD Kecamatan Tuter tahun 2020, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu kinerja OPD Kecamatan Tuter merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Tutur**  
**Kabupaten Pasuruan**

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			85 Skor	85 Skor	85 Skor	90 Skor	85 Skor	-	-	90 Skor	
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan			65 Nilai	70 Nilai	65 Nilai	81 Nilai	67,06 Nilai	-	-	81 Nilai	

### **2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan baik lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Tukur, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi di Kecamatan Tukur sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan Tukur dan hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Tukur.
  - a) Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Tukur sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Tukur.
  - b) Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di Wilayah Kecamatan Tukur hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Pasuruan.
  - c) Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tukur sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pelayanan dan untuk mendukung daerah Agropolitan khususnya kecamatan Tukur yang masuk dalam wilayah Bromo Tengger Semeru di mana akses masuk dalam wilayah wisata Bromo Tengger yang akses jalan menuju tempat wisata itu masih minim penerangan lampu jalan dan perl pengembangan Sumber Daya untuk pengembangan

UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Tukur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Wilayah tersebut.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional / Internasional, SDGs (*Sustainable Development Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

**Tantangan:**

- a) Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan
- b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik, pembangunan, administrasi keuangan dan kepegawaian perangkat daerah, dan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung

**Peluang:**

- a) Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada
- b) Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Tukur terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:

- a) Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2021, telah dilaksanakan melalui Musrenbang, program dan kegiatan yang diusulkan sudah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yaitu Konektifitas Infrastruktur sehingga sinkron dengan program RPJMD Kabupaten Pasuruan.

- b) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada tahun anggaran 2021, OPD Kecamatan Tukur, melalui program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Tukur dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

- c) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pada tahun anggaran 2022, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Tukur melalui program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

d) **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Untuk mewujudkan perekonomian yang handal berbasis potensi dan sebagai kawasan Bromo Tengger Semeru ( BTS ) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif. Kecamatan Tukur melibatkan masyarakat secara langsung dan pelaku bisnis bersama sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya berkelanjutan menuju masyarakat berbudaya, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui Program Pemberdayaan Masyarakat.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini. Berikut proses review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- 1) Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang tingkat Desa, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang fisik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2022.
- 2) Alasan proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Tukur sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada Tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4**  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022  
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tuttur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Kec.Tuttur	<b>Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>2,331,189,010</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Kec.Tuttur	<b>Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>2,156,334,148</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec.Tuttur	<b>Prosentase Pemenuhan</b>	<b>100%</b>	<b>2,007,751,000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec.Tuttur	<b>Prosentase Pemenuhan</b>	<b>100%</b>	<b>1,906,444,060</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Tuttur	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1,693,771,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Tuttur	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1,595,404,060	Gaji, tpp
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Tuttur	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Kegiatan Honor / Lapangan	1 Tahun	282,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Tuttur	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Kegiatan Honor / Lapangan	1 Tahun	282,000,000	Honor THL, PTT, Koran / Majalah
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec.Tuttur	Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Pengelola Aset, Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun	31,980,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec.Tuttur	Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Pengelola Aset, Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun	29,040,000	Honor PPTK, DII
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kec.Tuttur	<b>Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>5,000,000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kec.Tuttur	<b>Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>4,000,000</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Tuttur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Tuttur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	4,000,000	Laporan Kinerja dan Keuangan Tahunan, Semesteran, Tribunalan
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kec.Tuttur	<b>Prosentase Pegawai Kompeten dan Disiplin</b>	<b>100%</b>	<b>8,800,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kec.Tuttur	<b>Prosentase Pegawai Kompeten dan Disiplin</b>	<b>0%</b>	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.Tuttur	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari - heri tertentu	40 Stel	8,800,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.Tuttur	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari - heri tertentu	0	-	

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kec.Tutur	<b>Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>194,522,910</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kec.Tutur	<b>Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>130,542,660</b>	
	Penyediaan peralatan dan Perengkapan Kantor	Kec.Tutur	Jumlah Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	3 Paket	65,999,910	Penyediaan peralatan dan Perengkapan Kantor	Kec.Tutur	Jumlah Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	3 Paket	36,752,660	ATK, Perabot Kantor, Benda Pos, Bahan Pembersih
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Kec.Tutur	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	13,000,000	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Kec.Tutur	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	8,000,000	Foto Copy dan Cetak
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Tutur	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	2 Keg	115,523,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Tutur	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	2 Keg	85,790,000	Mamin Rapat , Perdin
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec.Tutur	<b>Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>8,600,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec.Tutur	<b>Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum</b>	<b>0%</b>	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Tutur	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3 Jenis	8,600,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Tutur	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	-	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec.Tutur	<b>Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>30,000,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec.Tutur	<b>Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>31,996,128</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kec.Tutur	Input Jumlah Pembayaran Listrik/wifi / Air/ Telephone	1 Tahun	30,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kec.Tutur	Input Jumlah Pembayaran Listrik/wifi / Air/ Telephone	48 Rek	31,996,128	Telfon, Wifi, Air, listrik
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec.Tutur	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>76,515,100</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec.Tutur	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>83,351,300</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Tutur	Jumlah Kendaraan yang di pelihara atau di bayarkan pajaknya	8 Unit	70,772,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Tutur	Jumlah Kendaraan yang di pelihara atau di bayarkan pajaknya	8 Unit	77,608,200	Pajak Kendaraan Dinas, BBM, Service
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Tutur	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	3 Jenis	5,743,100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Tutur	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	3 Jenis	5,743,100	Service Peralatan Printer, Laptop, Komputer
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Kec.Tutur	Jumlah Rehabiltasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	1 Paket		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Kec.Tutur	Jumlah Rehabiltasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	0	-	
	<b>Urusan Unsur Kewilayah</b>					<b>Urusan Unsur Kewilayah</b>					
	<b>Bidang Urusan Kecamatan</b>					<b>Bidang Urusan Kecamatan</b>					

	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Kec.Tutur	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	100%	152,400,000	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Kec.Tutur	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	100%	15,789,600	
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kec.Tutur	<b>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	5 Keg	152,400,000	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kec.Tutur	<b>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	1 Keg	15,789,600	
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Tutur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	5 Keg	152,400,000	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Tutur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	1 Keg	15,789,600	Musrenbang
	<b>Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	Kec.Tutur	<b>Meningkatnya Nilai SKM kecamatan</b>	100%	70,481,990	<b>Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	Kec.Tutur	<b>Meningkatnya Nilai SKM kecamatan</b>	100%	11,767,500	
	<b>koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</b>	Kec.Tutur	<b>Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan</b>	3 Keg	70,481,990	<b>koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</b>	Kec.Tutur	<b>Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan</b>	1 Keg	11,767,500	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec.Tutur	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	3 Keg	70,481,990	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec.Tutur	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	1 Keg	11,767,500	PKK
	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Kec.Tutur	<b>Meningkatnya Nilai SKM kecamatan</b>	4 Keg	14,700,000	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Kec.Tutur	<b>Meningkatnya Nilai SKM kecamatan</b>	4 Keg	4,000,000	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Kec.Tutur	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	4 Keg	14,700,000	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Kec.Tutur	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	4 Keg	4,000,000	



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Tukur Tahun 2022 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat. Berikut tahapan – tahapan hasil dari musrenbang:

- a) Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- b) Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut diharapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tukur dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan seperti pada Tabel 2.5 berikut:

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**  
**Kabupaten Pasuruan**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Lokasi(des/ kel)	Volume
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Kabupaten/kota	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Perbaikan dan penggantian sebagian komponen Lampu	Dusun Krajan I, Dusun Krajan III, Dusun Sawahtalun, Dusun	300 Unit
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan peningkatan	Pangkal Dusun Sugro Desa Andonosari-Ujung Desa	16.000 Meter
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan peningkatan	Dusun Arjosari Desa Andonosari - Ujung Desa	4000 Meter Persegi
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan peningkatan	Dusun Krajan III RT 002 RW 001 (Bekotong) - Dusun Arjosari RT	2400 Meter Persegi
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dusun Sawahtalun RT 001 RW 001 - Dusun Arjosari, Ds.	600 Meter
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	Dusun Krajan I RT 004 RW 002 (Sekarkuning-Besuki) Ds.	15 Meter Kibik
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	- Panjang jalan yg dilakukan pemeliharaan skala	Dusun Manggungan Ds. Blarang	5250 Meter
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dusun Krajan Blarang Rt 01 Ds. Blarang	100.0000 Meter
9	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	Panjang median yang dilakukan pemeliharaan	Dusun Krajan Blarang Rt 01 - 09 Ds. Blarang	3000 Meter
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	- Panjang jalan yg dilakukan pemeliharaan skala	Dusun Bangking RT 001 RW 001 Ds. Gendro	9900 Meter Persegi
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	- Panjang jalan yg dilakukan pemeliharaan skala	Dusun Gerdu RT 004 RW 002 Ds. Gendro	200 Meter
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Jalan Raya Gerdu - Tuban Ds. Gendro	400 Meter
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dsn Mucangan RT.01 RW.05 Ds. Kalipucang	64 Meter
14	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dsn. Kuntul Selatan RT.01 s/d RT 04 Ds. Kalipucang	480 Meter
15	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dsn. Dodogan RT.04 RW.04 Ds. Kalipucang	40 Meter

16	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan peningkatan	Dusun Taman Rt.06 Desa Kayukebek	6000 Meter
17	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Kabupaten/kota	Pembangunan/ Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah LPJU yang dibangun/ditingkatkan	Dusun Taman Desa kayukebek	30 Paket
18	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	- Panjang jalan yg dilakukan pemeliharaan skala	Dusun Taman RT.01 Desa Kayukebek	6000 Meter
19	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dusun Ledok Kepor, RT 002 RW 002 Ds. Ngadirejo	1000 Meter
20	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dusun Kletak, RT 002 RW 001 Ds. Ngadirejo	400 Meter
21	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dusun Krajan, RT 001 RW 003 Ds. Ngadirejo	1500 Meter
22	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dusun Wonokoyo RT 001 RW 005 Ds. Ngadirejo	1500 Meter
23	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Kabupaten/kota	Pembangunan/ Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah LPJU yang dibangun/ditingkatkan	Ngadirejo	50 Titik
24	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan peningkatan	Dusun Wadung - Dusun Andong Selatan Ds. Ngembal	3240 Meter
25	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan peningkatan	Dusun Ledok Ds. Ngembal	1485 Meter
26	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan peningkatan	Dusun Prodo Ds. Ngembal	5940 Meter
27	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan peningkatan	Dusun Kelek - Garutan Ds. Ngembal	3300 Meter
28	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Ngembal	700 Meter
29	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dusun Bandut Desa Ngembal	400 Meter
30	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan peningkatan	Dusun Cemoro Desa Pungging	1575 Meter Persegi
31	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Kabupaten/kota	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Perbaikan dan penggantian sebagian komponen Lampu	Pungging	300 Meter
32	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	- Panjang jalan yg dilakukan pemeliharaan skala	Desa Pungging Ke Desa Kalipucang	2000 Meter
33	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dusun Cemoro Ds. Pungging	500 Meter
34	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dusun Curah Buntung Desa Sumberpitu	48 Meter

35	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dsn. Campal RT 003 RW 005 Desa Sumberpitu	48 Meter
36	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dsn. Dompok RT 001 RW 003 Desa Sumberpitu	48 Meter
37	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dsn. Tuyowono Desa Sumberpitu	48 Meter
38	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dsn. Sumberpitu Desa sumberpitu	48 Meter
39	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan peningkatan	Dsn. Dompok RT 002 RW 003 Desa Sumberpitu	4500 Meter
40	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Kabupaten/kota	Pembangunan/ Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah LPJU yang dibangun/ditingkatkan	Dsn. Sumberpitu Desa Sumberpitu	30 Unit
41	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Kabupaten/kota	Pembangunan/ Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah LPJU yang dibangun/ditingkatkan	Dsn. Tuyowono Desa Sumberpitu	30 Unit
42	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Kabupaten/kota	Pembangunan/ Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah LPJU yang dibangun/ditingkatkan	Dsn. Dompok Desa Sumberpitu	30 Unit
43	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Kabupaten/kota	Pembangunan/ Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah LPJU yang dibangun/ditingkatkan	Dsn. Curah Buntung Desa Sumberpitu	30 Unit
44	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Kabupaten/kota	Pembangunan/ Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah LPJU yang dibangun/ditingkatkan	Dsn. Campal Desa Sumberpitu	30 Unit
45	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	Dusun Gudang Ds. Tlogosari	45 Meter
46	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dusun Bodo RT 02 - RT 03 Ds. Tlogosari	200 Meter
47	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan peningkatan	Dusun Bodo - Dusun Gudang Ds. Tlogosari	500 Meter
48	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan peningkatan	Dusun Tlogosari - Dusun Gudang Ds. Tlogosari	500 Meter
49	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Kabupaten/kota	Pembangunan/ Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah LPJU yang dibangun/ditingkatkan	Dsn. Tuyowono Desa Sumberpitu	30 Unit
50	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Krajan I RT 09 RW 02 Ds. Tukur	350 Meter
51	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dusun Krajan II RT 01 RW 01 Ds. Tukur	300 Meter
52	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dusun Gunung Petung Rt 01 Rw 01 Ds. Tukur	2000 Meter
53	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dusun Kadipaten RT 01 RW 01 Ds. Tukur	1000 Meter

54	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan pengembangan Sistem	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Dusun Tuter Wetan RT 04 RW 01 Ds. Tuter	400 Meter
55	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Kabupaten/kota	Pembangunan/ Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah LPJU yang dibangun/ditingkatkan	Krajan II RT 01 RW 01 Ds. Tuter	20 Titik
56	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	Rehabilitasi Jalan	Dusun Wonosari Tengah & Dusun Putuk Ds. Wonosari	3000 Meter Persegi
57	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	Panjang median yang dilakukan pemeliharaan	Dusun Ngadipuro Ds. Wonosari	3200 Meter Persegi
58	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Kabupaten/kota	Pembangunan/ Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah LPJU yang dibangun/ditingkatkan	Wonosari	100 Unit
59	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah KK yang terlayani akses sanitasi	Andonosari	5 Unit
60	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah KK yang terlayani akses sanitasi	Andonosari	15 Paket
61	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan	Luas wilayah permukiman kumuh yang ditangani	Dusun Krajan III Ds. Andonosari	150 Meter
62	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan	Luas wilayah permukiman kumuh yang ditangani	Dusun Krajan III RT 004 RW 002 Ds. Andonosari	500 Meter
63	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan	Jumlah KK yang terlayani air minum	Dusun Krajan Ds. Blarang	7000 Meter
64	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan		Dusun Dukutan RT 009 RW 003 Ds. Gendro	960 Meter
65	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan	Jumlah KK yang terlayani air minum	Dusun Gerdu Ds.Gendro	157 SR
66	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan	Jumlah KK yang terlayani air minum	Dusun Krajan Ds.Gendro	145 SR
67	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan	Jumlah KK yang terlayani air minum	Dusun Bangking Ds. Gendro	75 SR
68	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan	Jumlah KK yang terlayani air minum	Dusun Tuban Ds. Gendro	135 SR
69	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan	Jumlah KK yang terlayani air minum	Dusun Dukutan Ds. Gendro	325 SR
70	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan	Jumlah KK yang terlayani air minum	Dsn. Cikur RT.04 Rw.06 Ds. Kalipucang	1000 Meter
71	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan	Luas wilayah permukiman kumuh yang ditangani	Dsn. Dodogan RT.03 RW.04 Ds. Kalipucang	250 Meter
72	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di	Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dusun Taman RT.01 Desa Kayukebek	4000 Meter

73	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan	Luas wilayah permukiman kumuh yang ditangani	Dusun Surorowo RT.01 Desa Kayukebek	200 Meter
74	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan	Jumlah KK yang terlayani air minum	Dusun Kletak Ds. Ngadirejo	3000 Meter
75	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan	Luas wilayah permukiman kumuh yang ditangani	Dusun Kletak, RT 001 RW 001 Ds. Ngadirejo	300 Meter
76	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan	Luas wilayah permukiman kumuh yang ditangani	Dusun Cemoro Gading, RT 001 RW 004 Ds. Ngadirejo	100 Meter
77	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di	Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Ngembal	400 Meter
78	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan	Jumlah KK yang terlayani air minum	Dusun Pungging & Dusun Cemoro Ds. Pungging	2000 Meter
79	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di	Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dusun wonorejo Ds. Pungging	350 Meter
80	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di	Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dusun Pungging & Dusun Cemoro Ds. Pungging	350 Meter
81	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan	Jumlah KK yang terlayani air minum	Sumberpitu	1500 Meter
82	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah KK yang terlayani akses sanitasi	Sumberpitu	30 Unit
83	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan	Luas wilayah permukiman kumuh yang ditangani	Dsn. Curah Buntung Desa sumberpitu	30 Meter
84	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan	Luas wilayah permukiman kumuh yang ditangani	Dsn. Campal Desa Sumberpitu	30 Meter
85	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan	Luas wilayah permukiman kumuh yang ditangani	Dsn. Dempok Desa Sumberpitu	30 Meter
86	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan	Luas wilayah permukiman kumuh yang ditangani	Dsn. Tuyowono Desa Sumberpitu	30 Meter
87	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan	Luas wilayah permukiman kumuh yang ditangani	Dsn. Sumberpitu RT 003 RW 001 Desa Sumberpitu	30 Meter
88	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan	Jumlah KK yang terlayani air minum	Dusun Tlogosari Ds. Tlogosari	1500 Meter
89	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan	Luas wilayah permukiman kumuh yang ditangani	Dusun Tlogosari Ds. Tlogosari	180 Meter
90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan		Dsn Krajan I RT 01 RW 01 Desa Tukur	100 Meter
91	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di	Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dsn Tukur Wetan RT 05 RW 02 Ds. Tukur	250 Meter

92	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan	Jumlah KK yang terlayani air minum	Dusun Krajan I Ds. Tukur	1000 Meter Persegi
93	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan	Jumlah KK yang terlayani air minum	Dusun Kadipaten Ds. Tukur	1000 Meter Persegi
94	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan	Jumlah KK yang terlayani air minum	Dusun Krajan II Ds. Tukur	1000 Meter Persegi
95	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai Bangunan Gedung	Jumlah rumah dinas / gedung kantor yang direhab	Dusun Wonosari Tengah Ds. Wonosari	28 Meter Persegi
96	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan	Jumlah KK yang terlayani air minum	Dusun Putuk dan Dusun Mesagi Ds. Wonosari	15000 Meter
97	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di	Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dusun Mesagi, Ngadipuro, Karanganyar Ds. Wonosari	600 Meter Persegi
98	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	Dusun Sugro (Singolangu) - Dusun Krajan I (Slorok Utara)	1500 Meter
99	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	Dusun Krajan I RT 004 RW 002 (Sekarkuning - Besuki) Ds.	3000 Meter
100	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	Dusun Sawahtalun RT 004 RW 002 Ds. Andonosari	2100 Meter
101	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	Dusun Pronojiwo Blarang RT 03 Ds. Blarang	4500 Meter
102	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	Dusun Mangungan Blarang RT 03 Ds. Blarang	5000 Meter
103	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	Dusun Ngaruh RT 03,04 Ds. Kayukebek	3000 Meter
104	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Dusun Taman, Karangrtejo, Ledok, Ngar	1000 Bibit
105	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	Dusun Ledok Kepor RT 002 RW 002 Ds. Ngadirejo	1000 Meter
106	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	Dusun Krajan RT 001 RW 003 Ds. Ngadirejo	1000 Meter
107	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	Dusun Wonokoyo RT 001 RW 005 Ds. Ngadirejo	2000 Meter
108	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Ngadirejo	50000 Bibit
109	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	Dsn. Curah Buntung RT 006 RW 004 Ds. Sumberpitu	2100 Meter
110	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Sumberpitu	50000 Bibit

111	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Sumberpitu	50000 Bibit
112	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	Dusun Ngepring Ds. Tlogosari	750 Meter
113	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	Dusun Kumbo Ds. Tlogosari	998 Meter
114	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung	Jumlah Kelompok Tani yang memiliki ketrampilan	Tlogosari	7 Unit
115	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	Dusun Ngadipuro RT.002 RW.001 dan Dusun Wonosari	932 Meter Persegi
116			Pelatihan pasca panen		Tlogosari	1 Kelompok
117	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak	Jumlah peternak yang dibina	Andonosari	100 Ekor
118	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak	Jumlah peternak yang dibina	Dusun Krajan I, Dusun Krajan II, Dusun Krajan III, Dusun	100 Ekor
119	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur	Jumlah akseptor yang dilayani (ekor)	Andonosari	100 Ekor
120	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT,	Jumlah akseptor yang dilayani (ekor)	Andonosari	40 Orang
121	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT,	Jumlah akseptor yang dilayani (ekor)	Ngembal	1 Paket
122	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak	Jumlah peternak yang dibina	Pungging	1 Paket
123	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak	Jumlah peternak yang dibina	Dsn. Campal RT 002 RW 005 Ds. Sumberpitu	30 Ekor
124	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak	Jumlah peternak yang dibina	Tlogosari	50 Ekor
125	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak	Jumlah peternak yang dibina	Tlogosari	1 Paket
126			Bimbingan Teknis dan Pelatihan Olahan Produk Ternak		Dusun Taman Desa Kayukebek	5 Paket
127			Bimbingan Teknis dan Pelatihan Olahan Produk Ternak		Tlogosari	1 Paket
128	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah yang terbentuk	Andonosari	40 Orang
129	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Jumlah sarpras di TPA	Andonosari	450 Meter Persegi

130	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Jumlah sarpras di TPA	Dusun Bangking RT 001 RW 001 Ds. Gendro	1 Unit
131	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah yang terbentuk	Dusun Ledok RT.01 Desa Kayukebek	2 Unit
132	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah yang terbentuk	Ngadirejo	1 Paket
133	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Jumlah sarpras di TPA	Pungging	3 Paket
134	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Jumlah sarpras di TPA	Dusun Krajan II Ds. Tukur	50 Unit
135	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terangkut ke TPA	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Wonosari	600 Meter Persegi
136	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terangkut ke TPA	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Wonosari	1 DUMP TRUCK
137	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terangkut ke TPA	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Wonosari	1 Paket
138	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan	Jumlah promosi melalui media pemasaran yang terlaksana	Dusun Ledok RT.05 RW.04 Ds. Kayukebek	1 Paket
139	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	Ngadirejo	1 Paket
140	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	Ngembal	1 Paket
141	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	Jumlah pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata	Pungging	1 Paket
142	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang dikembangkan	Gunung Gendis Ds. Tlogosari	1 Paket
143	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang dikembangkan	Dusun Bodo Desa Tlogosari	2 Unit
144	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang dikembangkan	Dusun Gunung Petung Ds. Tukur	1 Paket
145	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang dikembangkan	Dusun Karanganyar Ds. Wonosari	675 Meter Persegi
146	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Jumlah Pencari Kerja	Andonosari	30 Orang
147	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Jumlah Pencari Kerja	Andonosari	40 Orang
148	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Jumlah Pencari Kerja	Andonosari	1 Paket

149	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Jumlah Pencari Kerja	Dusun Taman, Karangrejo, Ledok, Ngaru	10 Paket
150	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Jumlah Pencari Kerja	Dusun Taman Ds. Kayukebek	2 Unit
151	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Jumlah Pencari Kerja	Sumberpitu	52 Orang
152	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	'Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah perlengkapan jalan terpelihara	Andonosari	50 Unit
153	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	'Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	'Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	Andonosari	1 Paket
154	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	Ngadirejo	100 Meter
155	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan	Dusun Ledok, Ngaruh, Surorowo dan Taman Ds.	2 Paket
156	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan	Ngembal	1 Paket
157	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah kebutuhan penyediaan sarana pendukung operasional	Blarang	100 Unit
158	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di	Jumlah kelompok yang mengikuti Sosialisasi	Tlogosari	1 Kelompok
159	Program Aplikasi Informatika	Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah SDM bidang TIK yang telah dibina	Andonosari	40 Orang
160	Program Informasi dan Komunikasi	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemberdayaan Seni Pertura	Pungging	1 Paket
161	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi penguatan	Ngadirejo	1 Paket
162	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi penguatan	Ngembal	1 Paket
163	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terbarukan	Kantor Desa Andonosari Dusun Krajan III RT 004 RW 002	1 Paket
164	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Sosialisasi terkait penggunaan dan manfaat sistem informasi	Andonosari	1 Paket

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Tukur.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tukur telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran yakni:

No	Uraian	Tujuan	Sasaran
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui yang prima kepada masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik	Kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dari pemerintahan	Masyarakat umum
2	Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata melalui Musrenbang RKPD	Sarana yang memadai di masyarakat	Masyarakat umum
3	Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya.	Ekonomi merata di segala bidang	Masyarakat umum
4	Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi	Reformasi birokrasi tanpa melanggar hukum yang ada	Organisasi/ LSM/masyarakat umum

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di

masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kecamatan Tukur, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat se Kecamatan Tukur baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang taruna, LPMD, dsb), serta koordinator pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
- 2) Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyarakat.
- 3) Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesionalisme di dalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Pasuruan yang Maslahat.
- 4) Mewujudkan sistem Pelaporan Keuangan yang baik dan akuntabel.

Adapun Sasaran strategik Kecamatan Tukur merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategi yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran strategik Kecamatan Tukur pengelompokkannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rancangan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Adapun keselaran program kegiatan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di  
Kecamatan

Indikator Tujuan : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )  
Kecamatan

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di  
Kecamatan Tukur

Indikator Sasaran :

1. Nilai SAKIP Kecamatan ( Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah )
2. Nilai IKM Kecamatan ( Indeks Kepuasan Masyarakat )

### **3.3. Program dan kegiatan**

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:
  1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun.
  2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
  3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa se Kecamatan.
- b. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKOPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKOPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.
- c. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tukur Tahun 2022 :
  1. Jumlah Program : 4 Program
  2. Jumlah Kegiatan : 10 Kegiatan
  3. Jumlah Sub Kegiatan : 10 Sub Kegiatan
  4. Total Anggaran : Rp. 2.187.891.248,-

**Tabel 3.3**  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tutur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan		70 Nilai	Rp	2,156,334,148			72 Nilai	Rp 2,252,273,910
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100%		4,000,000			100%	Rp 10,000,000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kec. Tutur	4 Lap	Rp	4,000,000	DAU		4 Lap	Rp 10,000,000
					Belanja operasi	Rp 4,000,000				
					Belanja pegawai	Rp -				
					Belanja barang dan jasa	Rp 4,000,000				
					Belanja bunga	Rp -				
					Belanja subsidi	Rp -				
					Belanja hibah	Rp -				
					Belanja bantuan sosial	Rp -				
					Belanja modal	Rp -				
					Belanja tidak terduga	Rp -				
					Belanja transfer	Rp -				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen administrasi Keuangan		100%		1,906,444,060			100%	Rp 2,007,751,000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tutur	12 Bulan	Rp	1,595,404,060			12 Bulan	Rp 1,693,771,000
					Belanja operasi					
					Belanja pegawai	Rp 1,595,404,060				
					Belanja barang dan jasa	Rp -				
					Belanja bunga	Rp -				
					Belanja subsidi	Rp -				
					Belanja hibah	Rp -				
					Belanja bantuan sosial	Rp -				
					Belanja modal	Rp -				
					Belanja tidak terduga	Rp -				
					Belanja transfer	Rp -				
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi	- Jumlah Pembayaran Jasa	Kec.	1 Orang/bulan	Rp	282,000,000			1 Orang/bulan	Rp 282,000,000

7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Tugas ASN	Kebersihan Kantor	Tutur		Belanja operasi	: Rp	282,000,000				
		- Jumlah Pembayaran Jasa		14 Orang/bulan	Belanja pegawai	: Rp	-		15 Orang/bulan		
		Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/perikatan			Belanja barang dan jasa	: Rp	282,000,000				
					Belanja bunga	: Rp	-				
					Belanja subsidi	: Rp	-				
					Belanja hibah	: Rp	-				
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-				
					Belanja modal	: Rp	-				
					Belanja tidak terduga	: Rp	-				
					Belanja transfer	: Rp	-				
7.01.01.2.06	Pelaksanaan	Jumlah Pembayaran	Kec.	7 Orang/bulan			Rp	29,040,000	7 Orang/bulan	Rp	31,980,000
	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honararium Pejabat Kegiatan dan Pelaku Pengadaan	Tutur		Belanja operasi	: Rp		29,040,000			
					Belanja pegawai	: Rp		-			
					Belanja barang dan jasa	: Rp		29,040,000			
					Belanja bunga	: Rp		-			
					Belanja subsidi	: Rp		-			
					Belanja hibah	: Rp		-			
					Belanja bantuan sosial	: Rp		-			
					Belanja modal	: Rp		-			
					Belanja tidak terduga	: Rp		-			
				Belanja transfer	: Rp		-				
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Pemenuhan Operasional Kantor</i>		100%			<b>Rp</b>	<b>130,542,660</b>	100%	<b>Rp</b>	<b>194,522,910</b>
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.	3 Paket			Rp	36,752,660	3 Paket	Rp	65,999,910
			Tutur		Belanja operasi	: Rp		36,752,660			
					Belanja pegawai	: Rp		-			
					Belanja barang dan jasa	: Rp		36,752,660			
					Belanja bunga	: Rp		-			
					Belanja subsidi	: Rp		-			
					Belanja hibah	: Rp		-			
					Belanja bantuan sosial	: Rp		-			
					Belanja modal	: Rp		-			
					Belanja tidak terduga	: Rp		-			
				Belanja transfer	: Rp		-				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadan	Jumlah Pembelian Barang dan Cetakan	Kec.	2 Jenis			Rp	8,000,000	2 Jenis	Rp	13,000,000
			Tutur		Belanja operasi	: Rp		8,000,000			
					Belanja pegawai	: Rp		-			
					Belanja barang dan jasa	: Rp		8,000,000			
					Belanja bunga	: Rp		-			
					Belanja subsidi	: Rp		-			
					Belanja hibah	: Rp		-			
					Belanja bantuan sosial	: Rp		-			
					Belanja modal	: Rp		-			
					Belanja tidak terduga	: Rp		-			
				Belanja transfer	: Rp		-				

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah - Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	Kec. Tukur	2 Keg	Rp	85,790,000		12 Bulan	Rp	115,523,000
					Belanja operasi	: Rp	85,790,000			
					Belanja pegawai	: Rp	-			
					Belanja barang dan jasa	: Rp	85,790,000			
					Belanja bunga	: Rp	-			
					Belanja subsidi	: Rp	-			
					Belanja hibah	: Rp	-			
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
					Belanja modal	: Rp	-			
					Belanja tidak terduga	: Rp	-			
					Belanja transfer	: Rp	-			
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>		<b>Rp</b>	<b>31,996,128</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>30,000,000</b>
X-XX-01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 Bulan	Kec. Tukur	48 Rekening	Rp	31,996,128		48 Rekening	Rp	30,000,000
					Belanja operasi	: Rp	31,996,128			
					Belanja pegawai	: Rp	-			
					Belanja barang dan jasa	: Rp	31,996,128			
					Belanja bunga	: Rp	-			
					Belanja subsidi	: Rp	-			
					Belanja hibah	: Rp	-			
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
					Belanja modal	: Rp	-			
					Belanja tidak terduga	: Rp	-			
					Belanja transfer	: Rp	-			
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Pegawai Kompeten dan Disiplin</b>		<b>0%</b>		<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>10,000,000</b>
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	Kec. Tukur	0	Rp	-		40 Stel	Rp	10,000,000
					Belanja operasi	: Rp	-			
					Belanja pegawai	: Rp	-			
					Belanja barang dan jasa	: Rp	-			
					Belanja bunga	: Rp	-			
					Belanja subsidi	: Rp	-			
					Belanja hibah	: Rp	-			
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
					Belanja modal	: Rp	-			
					Belanja tidak terduga	: Rp	-			
					Belanja transfer	: Rp	-			
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum</b>		<b>0%</b>		<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>10,000,000</b>
7.01.01.2.08.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Kec. Tukur	0	Rp	-		4 Unit	Rp	10,000,000
					Belanja operasi	: Rp	-			

	atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya			Belanja pegawai : Rp	-			
					Belanja barang dan jasa : Rp	-			
					Belanja bunga : Rp	-			
					Belanja subsidi : Rp	-			
					Belanja hibah : Rp	-			
					Belanja bantuan sosial : Rp	-			
					Belanja modal : Rp	-			
					Belanja tidak terduga : Rp	-			
					Belanja transfer : Rp	-			
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>		<b>100%</b>		<b>Rp 83,351,300</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 80,000,000</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kec. Tutar	8 unit		Rp 77,608,200		8 unit	Rp 80,000,000
					Belanja operasi : Rp	77,608,200			
					Belanja pegawai : Rp	-			
					Belanja barang dan jasa : Rp	77,608,200			
					Belanja bunga : Rp	-			
					Belanja subsidi : Rp	-			
					Belanja hibah : Rp	-			
					Belanja bantuan sosial : Rp	-			
					Belanja modal : Rp	-			
					Belanja tidak terduga : Rp	-			
					Belanja transfer : Rp	-			
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Kantor	Kec. Tutar	3 Jenis		Rp 5,743,100		3 Jenis	Rp 10,000,000
					Belanja operasi : Rp	5,743,100			
					Belanja pegawai : Rp	-			
					Belanja barang dan jasa : Rp	5,743,100			
					Belanja bunga : Rp	-			
					Belanja subsidi : Rp	-			
					Belanja hibah : Rp	-			
					Belanja bantuan sosial : Rp	-			
					Belanja modal : Rp	-			
					Belanja tidak terduga : Rp	-			
					Belanja transfer : Rp	-			
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Kantor	Kec. Tutar	3 Jenis		Rp -		3 Jenis	Rp 10,000,000
					Belanja operasi : Rp	-			
					Belanja pegawai : Rp	-			
					Belanja barang dan jasa : Rp	-			
					Belanja bunga : Rp	-			
					Belanja subsidi : Rp	-			
					Belanja hibah : Rp	-			
					Belanja bantuan sosial : Rp	-			
					Belanja modal : Rp	-			
					Belanja tidak terduga : Rp	-			
					Belanja transfer : Rp	-			

	<b>Urusan Kewilayahan</b>								
<b>7.01.02</b>	<b>Bidang Kecamatan</b>								
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya Nilai SKM kecamatan</b>		<b>88 Skor</b>		<b>15,789,600</b>		<b>88 Skor</b>	<b>Rp 153,000,000</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>100%</b>		<b>15,789,600</b>		<b>100%</b>	
7.01.02.2.01.02	Koordinasi/Sinergi	Jumlah Laporan Hasil Koord	Kec.	1 Keg	Rp	15,789,600		2 Keg	Rp 153,000,000
	Perencanaan dan	inasi Perencanaan dan Pelak	Tatur		<i>Belanja operasi</i>	: Rp 15,789,600			
	Pelaksanaan Kegiatan	sanaan Kegiatan			Belanja pegawai	: Rp -			
	Pemerintahan dengan				Belanja barang dan jasa	: Rp 15,789,600			
	Perangkat Daerah dan				Belanja bunga	: Rp -			
	Instansi Vertikal Terkait				Belanja subsidi	: Rp -			
					Belanja hibah	: Rp -			
					Belanja bantuan sosial	: Rp -			
					<i>Belanja modal</i>	: Rp -			
					<i>Belanja tidak terduga</i>	: Rp -			
					<i>Belanja transfer</i>	: Rp -			
	...								
<b>7.01.03</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Nilai SKM kecamatan</b>		<b>100%</b>		<b>Rp 11,767,500</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 120,000,000</b>
<b>7.01.03.2.01.03</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>100%</b>		<b>11,767,500</b>		<b>100%</b>	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kec.	1 Keg	Rp	11,767,500		4 Keg	Rp 70,481,990
			Tatur		<i>Belanja operasi</i>	: Rp 11,767,500			
					Belanja pegawai	: Rp -			
					Belanja barang dan jasa	: Rp 11,767,500			
					Belanja bunga	: Rp -			
					Belanja subsidi	: Rp -			
					Belanja hibah	: Rp -			
					Belanja bantuan sosial	: Rp -			
					<i>Belanja modal</i>	: Rp -			
					<i>Belanja tidak terduga</i>	: Rp -			
					<i>Belanja transfer</i>	: Rp -			
<b>7.01.04</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Meningkatnya Nilai SKM kecamatan</b>		<b>100%</b>		<b>4,000,000</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 14,700,000</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Presentase Kantrantibmas Yang Ditangani</b>		<b>100%</b>		<b>4,000,000</b>		<b>100%</b>	
7.01.04.2.02.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Terlaksananya Kegiatan Pantau Wilayah (Patroli)	Kec.	4 Keg	Rp	4,000,000		4 Keg	14,700,000
			Tatur		<i>Belanja operasi</i>	: Rp 4,000,000			
					Belanja pegawai	: Rp -			
					Belanja barang dan jasa	: Rp 4,000,000			

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
				Total Belanja operasi	: Rp	2,187,891,248			
				Belanja pegawai	: Rp	1,595,404,060			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	592,487,188			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Total Belanja modal	: Rp	-			
				Total Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Total Belanja transfer	: Rp	-			
			<b>Total Belanja PD</b>	<b>: Rp</b>	<b>2,187,891,248</b>			<b>Rp 2,629,973,910</b>	

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENJA tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 sebagai acuan bagi satuan kerja perangkat daerah (OPD). Rencana kerja tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran APBD tahun 2022 dimana pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Pelaksanaan kegiatan OPD Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah dipogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan tersusunnya Renja OPD Kecamatan Tuter pada Tahun 2022, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

Anggaran sementara Tahun 2022 dengan kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Tuter Tahun 2022 memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka pelayanan publik juga perubahan atau perkembangan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya;
2. Kecamatan Tuter dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berperan serta untuk melaksanakan program-program Renja Kecamatan Tuter Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya;
3. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Tuter Tahun 2022, Renja Kecamatan Tuter Tahun 2022 ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan dalam penganggaran

Rencana tindak lanjut Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tuter selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Tuter. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Tuter Tahun 2022 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
2. Disamping itu Renja Kecamatan Tuter juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai, sumber dana dan sarana prasarana yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan kata lain rencana kerja ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemen bisa seimbang dan berkesinambungan.

Diharapkan sekali Renja OPD Kecamatan Tukur tahun 2022 dapat dijadikan pedoman dan perumusan Rencana Kerja dan anggaran Kecamatan Tukur tahun 2023.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF